



Pengelolaan Desa Wisata berbasis *Community-Based Tourism* pada Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Bagas Firzi Firmansyah^{1*}, Fakhruddin²

¹⁻²Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Korespondensi penulis: bagasfirzi20@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of tourism villages has been carried out in several regions in Indonesia as an effort to improve the tourism sector through the management of village potential by the local community. This concept is in line with Community Based Tourism (CBT), as implemented in Desa Wisata Kalongan, which is managed directly by the local community and provides direct benefits. This study aims to identify the management of tourism villages, which consists of several management stages by implementing the CBT concept so that the community can directly benefit. This study uses qualitative methods with observation, interviews, and documentation techniques. Data validity is tested through source and technique triangulation. Data analysis was conducted through collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the management of Desa Wisata Kalongan involves four stages of management that require active community participation, including planning activities with the establishment of vision, mission, objectives, identification of potential, and program development; provision of facilities; and budgeting in accordance with existing policies; organization activities through the formation of organizational structures and participatory work systems; implementation activities supported by coordination, active community involvement, and community development through training; and supervision through monitoring and evaluation in collaboration with the village government. The implementation of CBT is reflected in community involvement in activities, ownership, and decision-making; cultural and environmental preservation; economic benefits for the community; and capacity building through training. The conclusion drawn from the research is that the management of Kalongan Tourism Village is carried out through the stages of planning, organizing, implementation, and supervision, which actively involve the community. The CBT concept is reflected in community participation in management activities, thereby reaping economic benefits, as well as playing a role in cultural and environmental preservation, and training activities that support village tourism development.*

Keywords: *Community Based-Tourism, Management, Tourism Village.*

Abstrak. Pengembangan desa wisata telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia sebagai upaya peningkatan sektor pariwisata yang dilakukan melalui pengelolaan potensi desa oleh masyarakat setempat. Konsep ini sejalan dengan Community Based-Tourism (CBT), sebagaimana diterapkan di Desa Wisata Kalongan yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat yang memberikan manfaat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan desa wisata yang terdiri dari beberapa tahapan pengelolaan dengan mengimplementasikan konsep CBT sehingga masyarakat mendapatkan manfaat secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Kalongan melalui 4 tahapan pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang meliputi kegiatan perencanaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, identifikasi potensi, dan penyusunan program, penyediaan fasilitas, penganggaran dana sesuai kebijakan yang ada; kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan struktur organisasi dan sistem kerja partisipatif; kegiatan pelaksanaan dengan didukung koordinasi, peran aktif masyarakat, dan pengembangan masyarakat melalui pelatihan; serta pengawasan melalui monitoring dan evaluasi bersama pemerintah desa. Implementasi CBT tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, kepemilikan, dan pengambilan keputusan; pelestarian budaya dan lingkungan; manfaat ekonomi yang didapat masyarakat, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Simpulan yang dihasilkan dari penelitian yakni pengelolaan Desa Wisata Kalongan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang secara aktif melibatkan masyarakat. Konsep CBT tercermin dalam partisipasi masyarakat yang melakukan kegiatan

pengelolaan sehingga mendapat manfaat ekonomi, serta berperan dalam pelestarian budaya, lingkungan, dan kegiatan pelatihan yang mendukung pengembangan wisata desa.

Kata Kunci: *Community Based-Tourism*, Desa Wisata, Pengelolaan.

1. LATAR BELAKANG

Sekarang ini banyak dijumpai wilayah pedesaan dengan ragam kekayaan alam yang membentang, kearifan lokal dan kebudayaan yang selalu terjaga keasliannya, dan juga berbagai bidang kehidupan yang ada pada suatu desa. Ragam potensi atau sumber daya pada wilayah pedesaan ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai atraksi atau daya tarik sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi kegiatan wisata. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai objek wisata (Juliana et al., 2021). Kegiatan pengembangan yang memanfaatkan potensi desa akan dijadikan sebuah daya tarik dan menciptakan rangkaian aktivitas pariwisata serta menyediakan kebutuhan orang yang akan datang pada sebuah daerah pedesaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini menjadi sebuah wujud kegiatan pariwisata atau dapat dikatakan sebagai desa wisata (Sutiani, 2021). Desa wisata mewakili implikasi dari pengembangan sektor pariwisata daerah yang menekankan pada ciri atau daya tarik suatu daerah, partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan dalam hal daya tarik wisata, aksesibilitas, akomodasi, dan fasilitas (Umam et al., 2022). Pengembangan wisata pedesaan akan dapat meningkatkan layanan wisata bagi masyarakat berupa diversifikasi pekerjaan, pelestarian warisan budaya, perlindungan lingkungan alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kusumastuti et al., 2024).

Keberadaan desa wisata di Indonesia mulai ditemukan pada tahun 1995 yakni Desa Panglipuran yang menjadi role model pengembangan sebuah desa wisata pertama kalinya (Ananda & Dirgahayu, 2021). Jumlah desa wisata yang ada di Indonesia pada saat ini mencapai 6107 desa yang terdiri dari 4758 desa wisata rintisan, 996 desa wisata berkembang, 318 desa wisata maju, dan sudah terdapat 35 desa wisata mandiri (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Kemajuan sektor pariwisata Indonesia terutama pemanfaatan wilayah pedesaan menjadi sebuah desa wisata ini sudah menjadi sebuah kegiatan positif untuk memberi nilai tambah atau bahkan ciri khas dari desa tersebut. Kegiatan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa menjadi sebuah daya tarik dan aktivitas pariwisata ini tentu lebih mudah apabila melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat akan menjadi pengelola objek wisata secara menyeluruh, menjadi pengurus organisasi pengelola desa wisata, menjadi pengelola atraksi yang ada, dan masih dapat berperan pada aspek-aspek lainnya (Suhaimi et

al., 2024). Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia atau dalam hal ini adalah masyarakat harus dilakukan untuk persiapan dari masyarakat tersebut dalam menghadapi era perkembangan zaman yang berubah secara dinamis (Wibowo et al., 2019). Memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan membuat mereka semakin termotivasi untuk bertanggung jawab menjaga dan melestarikan potensi desa yang ada (Oka et al., 2021). Dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan wisata ini, masyarakat akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan nantinya akan mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata yang dijalankan.

Pengelolaan adalah proses untuk memanfaatkan sumber daya baik fisik maupun manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan proses pengorganisasian, pengelolaan, koordinasi, dan evaluasi pencapaian tujuan (Suminar et al., 2021). Pengelolaan menjadi sebuah aktivitas yang sifatnya kolaboratif dengan melibatkan kegiatan pengorganisasian, pengalokasian, dan pengawasan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien (Nafisah & Kisworo, 2022). Dengan adanya kegiatan pengelolaan, kegiatan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih mudah, tersusun secara runtut, dan berjalan lebih teratur dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Terdapat 4 fungsi pengelolaan menurut George R. Terry yang meliputi kegiatan *Planning* merupakan kegiatan pemilihan dan penghubung fakta serta perkiraan atau asumsi dimasa mendatang dengan menggambarkan serta merumuskan kegiatan yang nantinya dilaksanakan guna mencapai hasil atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya; *Organizing* merupakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan penempatan orang, serta penentuan wewenang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya; *Actuating* merupakan kegiatan untuk mendorong anggota agar berusaha keras untuk mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dari pimpinan; dan *Controlling* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan secara teratur, terarah atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya (Terry, 2019).

Dalam kegiatan pengembangan sebuah desa wisata tentu didalamnya terdapat beberapa tahapan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terkait berjalannya aktivitas pariwisata yang dijalankan. Keberhasilan pengelolaan desa wisata akan bergantung pada tingkat partisipasi dari masyarakat setempat karena mereka akan lebih mengetahui potensi sekitarnya. Pengelolaan desa wisata menjadi sebuah konsep dimana pariwisata harus dikelola oleh masyarakat dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan sebagai pilar utama agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengelola potensi wisata di wilayahnya

(Hadiwijoyo, 2018). Pengelolaan desa wisata yang melibatkan masyarakat harus dimulai dimana masyarakat harus memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pariwisata terlebih lagi di desa mereka sendiri (Purwoko & Wijayanti, 2022). Pengelolaan desa wisata berbasis community based-tourism ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata menjadi sebuah langkah konkret yang diambil untuk memberikan masyarakat lokal suatu kendali atas pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang ada di desa tersebut. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang ada sumber daya alam lokal sehingga menjamin kualitas hidup masyarakat sekitar menjadi lebih baik (Setyowati et al., 2023).

Fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat muncul pada tahun kritik terhadap pengelolaan pariwisata yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan kurang kemampuan memberdayakan masyarakat (Shan & Septemuryantoro, 2023). Community based-tourism merupakan kegiatan pariwisata yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dimana kegiatan pariwisata dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuannya dapat meningkatkan kesadaran dan mempelajari tentang cara hidup masyarakat setempat yang diperlihatkan kepada pengunjung (Suansri, 2003). Dari pernyataan sebelumnya, konsep community based tourism meliputi beberapa aspek yakni kepemilikan dan kontrol lokal; manfaat ekonomi pariwisata; pelestarian budaya dan lingkungan; partisipasi masyarakat; serta adanya program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan wisata. Dengan diterapkannya community based tourism pada kegiatan pengelolaan wisata ini tidak hanya dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, akan tetapi banyak memberikan manfaat baik itu dari segi pelestarian alam, budaya, dan aspek kehidupan serta memberi peluang kepada masyarakat untuk berdaya.

Terkait dengan pengelolaan desa wisata yang menerapkan konsep community based tourism ini banyak bermunculan desa-desa yang berlomba untuk memanfaatkan potensi desanya masing-masing guna menciptakan karakteristik dan keunggulan di desa tersebut. Seperti halnya di daerah Kabupaten Semarang, dimana pemerintah juga turut aktif memberikan dukungan kepada masyarakatnya. Saat ini ada sekitar 35 desa wisata yang telah dan terus mengembangkan usahanya (PPID Kabupaten Semarang, 2024). Terdapat salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Semarang yakni Desa Wisata Kalongan yang berlokasi di Kecamatan Ungaran Timur dimana desa ini diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2023. Keunggulan yang ada pada Desa Wisata Kalongan ini terletak kapasitas sumber daya manusianya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata yang bernama Pokdarwis Loka Jaya (Mahmud et al., 2024). Kegiatan penyelenggaraan kegiatan pariwisata pada desa ini masih

terpaku pada penyelenggaraan di beberapa objek wisata saja dimana seharusnya dapat dimanfaatkan potensi alam dan budaya yang dikembangkan menjadi sebuah daya tarik yang bisa diberikan kepada wisatawan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Umar et al., 2023) dengan judul "Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism di Desa Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi" dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Adat Osing Kemiren serta terdapat pelestarian budaya lingkungan menjadi lebih terjaga karena adanya pengembangan desa wisata. sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat berupa diterapkannya pemerataan pendapatan dari hasil kegiatan pariwisata (Umar et al., 2023). Pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi terkait pendekatan konsep *community based-tourism* yang digunakan dalam setiap kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan sehingga diharapkan dapat ditemukan sebuah temuan hubungan pengelolaan desa wisata yang berbasis *community based-tourism* terkhusus pada Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa aspek-aspek dari konsep *community based-tourism* yang sudah diterapkan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menguraikan gejala atau peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif menjadi suatu metode untuk meneliti kondisi alami dimana peneliti sebagai instrumen utama yang melalui pengumpulan data triangulasi, analisis induktif, dan menekankan pada pemahaman makna (Sugiyono, 2020). Penelitian kualitatif memiliki fokus pada beberapa masalah aktual yang ada saat penelitian berlangsung terkait pengelolaan desa wisata yang berbasis *community based-tourism*. Permasalahan pada penelitian ini yang sudah ditemukan kemudian dirumuskan secara khusus agar instrumen dan sumber data terfokus pada lingkup tujuan dan bahasan penelitian. Pada penelitian ini akan diidentifikasi terkait pengelolaan desa wisata dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community based-tourism*) pada Desa Wisata Kalongan. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Pokdarwis, Anggota Pokdarwis, Anggota BUMDes, Masyarakat Pelaku Usaha, dan Kepala Desa Kalongan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perencanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan

Perencanaan menjadi langkah awal dalam penentuan sebuah proses pengelolaan suatu kegiatan karena di dalamnya terdapat kegiatan teknis untuk menyusun program dan juga merumuskan arah dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan perencanaan desa wisata dimulai dengan mengidentifikasi potensi wisata yang ada, dilanjutkan dengan penetapan tujuan pengelolaan desa wisata, merumuskan program wisata, penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan wisata, penganggaran dana sesuai prioritas utama kegiatan, dan penetapan kebijakan dalam berjalannya kegiatan desa wisata (Amalia & Ilyas, 2024). Pada praktek pengelolaan desa wisata sebagai tahap pertama dalam kegiatan perencanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan, dilakukan perumusan visi, misi dan tujuan dimana telah dirumuskan secara lisan namun belum terdokumentasi secara formal. Visi utamanya adalah menjadikan desa sebagai destinasi wisata dengan misi fokus pada pengembangan potensi dan pelibatan masyarakat, serta memiliki tujuan untuk berupaya peningkatan ekonomi desa. Tahap selanjutnya pada kegiatan perencanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan adalah proses kegiatan pengidentifikasian sumber daya dan potensi lokal ini meliputi potensi wisata alam berupa objek wisata, budaya, serta kegiatan ekonomi lokal. Identifikasi dan perencanaan dilakukan bertahap melalui pendekatan partisipatif antara pengelola, BUMDes, dan pemilik wisata, dengan koordinasi yang baik untuk penyusunan kegiatan wisata. Pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, program wisata dirancang melalui musyawarah bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan pemilik usaha yang menghasilkan rumusan yang dirangkum dalam paket wisata mencakup objek atau kegiatan wisata dengan atraksi alam, budaya, dan edukasi yang siap ditawarkan kepada wisatawan melalui berbagai platform promosi.

Berjalannya kegiatan wisata di Desa Wisata Kalongan diikuti dengan penyediaan berbagai fasilitas penunjang kegiatan wisata berupa mushola, toilet, kursi kayu, gazebo, joglo, serta layanan penginapan dan transportasi serta sedang diupayakan ruang Tourism Information Center untuk meningkatkan pelayanan wisata. Pengelola berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dengan harapan besar untuk memiliki fasilitas milik desa. Dalam sebuah penyelenggaraan kegiatan wisata dibutuhkan elemen uang atau dalam pengelolaan sebuah kegiatan dibutuhkan dana yang digunakan sebagai penunjang kegiatan, dimana pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan penganggaran dananya bersumber dari dana penyertaan desa wisata, dana desa, dan bantuan pemerintah, serta dukungan mitra desa. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan untuk mendukung keberlanjutan program desa wisata. Pada tahap

perencanaan dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan, kegiatan pengelolaan dana yang transparan dengan berdasarkan prioritas kegiatan yang ada menjadi elemen pendukung dalam keberhasilan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada desa wisata karena dapat dilaporkan penggunaan dananya sehingga masyarakat, mitra desa, dan pemerintah memiliki tingkat kepercayaan dalam kegiatan pengelolaan dana kegiatan desa wisata. Pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, penyelenggaraannya mengacu pada kebijakan pemerintah dari pusat hingga desa dimana kebijakan pemberdayaan masyarakat dan legalitas desa wisata menjadi dasar operasional.

Jadi pada kegiatan perencanaan dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan terdapat beberapa kegiatan yakni perumusan visi, misi, serta tujuan; identifikasi sumber daya dan potensi lokal, perumusan program; penyediaan fasilitas dan sarana atau prasarana; penganggaran dana; dan juga mengimplementasikan kebijakan yang ada terkait penyelenggaraan desa wisata sebelum dilaksanakannya kegiatan wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry (dalam Khasanah, 2022), bahwa dalam kegiatan perencanaan terdapat beberapa kegiatan yakni penentuan tujuan, penentuan sumber daya, dan menentukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan melalui perencanaan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan harus melalui beberapa tahapan baik mulai dari perumusan tujuan, identifikasi sumber daya, perumusan program, perencanaan penyediaan fasilitas, penganggaran dana, dan membuat atau melaksanakan kebijakan menjadi langkah-langkah yang akan menentukan dalam upaya mencapai tujuan. Dengan melalui beberapa tahapan yang ada pada kegiatan perencanaan, penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Kalongan ini akan mendukung upaya pencapaian tujuan karena memiliki rencana-rencana yang telah disusun sedemikian rupa guna menunjang pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Kegiatan pengorganisasian pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan

Kegiatan pengorganisasian merupakan tahapan dimana terdapat langkah kegiatan yang meliputi pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, penetapan wewenang dan tanggung jawab serta terdapat kegiatan koordinasi dari sumber daya organisasi yang ada. Dalam kegiatan pengorganisasian dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi yang akan digerakkan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, pembentukan struktur organisasi telah dibentuk sejak awal diakui sebagai desa wisata yang didalamnya terdiri dari 25 anggota dengan posisi mulai dari penasehat (kepala desa), ketua, sekretaris, bendahara, hingga beberapa seksi. Dalam pemilihan masyarakat yang akan tercantum dalam struktur

organisasi, kegiatan pembentukan struktur organisasi melibatkan perwakilan dari berbagai komunitas masyarakat. Masyarakat yang tercantum dalam struktur organisasi merupakan perwakilan dari berbagai komunitas namun kegiatan pelaksanaan utamanya dilaksanakan melalui kolaborasi erat antara anggota BUMDes dan Pokdarwis.

Setelah dilaksanakan pembentukan struktur organisasi tentunya setiap individu yang tergabung akan memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan bidang keahlian individu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengelolaan Desa Wisata Kalongan, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi dibagi sesuai struktur, dengan pelaksanaan kegiatan yang fleksibel dan saling membantu. Pada event seperti Pasar Sawahan, pembagian tugas dilakukan secara bergiliran. Kolaborasi utama terjalin antara BUMDes dan Pokdarwis, sementara pemerintah desa berperan sebagai penasihat dan pemberi arahan. Setelah terbentuk sebuah organisasi dan sudah dibagikan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan disusun sebuah rencana kerja untuk mempermudah saat kegiatan pelaksanaan berlangsung. Setelah melalui tahap pembagian tugas, kemudian disusun rencana kerja melalui kegiatan musyawarah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui perwakilan yang ada dan dihadiri pemerintah desa sebagai fasilitator. Kegiatan ini mencakup pembagian tugas, briefing, dan pengambilan keputusan berdasarkan masukan yang ada.

Pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, kegiatan pengorganisasian dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penyusunan rencana kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat (Terry, 2019) pada tahap pengorganisasian dilakukan dalam bentuk kegiatan menentukan, mengelompokkan, dan menyusun dari penempatan sumber daya manusia serta penentuan tugas serta wewenang dalam hubungannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya sesuai tujuan yang diharapkan. Temuan penelitian terkait kegiatan pengorganisasian pada pengelolaan sebuah desa wisata (Amalia & Ilyas, 2024) kegiatan ini dilaksanakan untuk membagi tugas atau tanggung jawab yang ditentukan sesuai bidang yang dikuasai serta kegiatan ini akan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Dalam tahapan pengorganisasian sebagai salah satu tahap dalam kegiatan pengelolaan, akan dilalui beberapa kegiatan seperti pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam hubungannya pada kegiatan yang dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan desa wisata, kegiatan pengorganisasian melibatkan masyarakat di dalamnya sesuai bidang yang dikuasai sehingga memudahkan dalam pembagian tugas sehingga masyarakat yang tergabung dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kegiatan pelaksanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan

Kegiatan pelaksanaan menjadi tahap dimana terdapat kegiatan penghubung antara kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dengan wujud realisasi kegiatan di lapangan. Berbagai rencana dan struktur yang sudah dibentuk kemudian diterapkan melalui keterlibatan sumber daya organisasi yang ada. Pada kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan, kegiatan pelaksanaan dijalankan dengan koordinasi dan komunikasi yang dibangun dengan cukup baik dimana terwujud dalam kegiatan musyawarah dan briefing sebelum kegiatan dimulai dan juga pada saat pelaksanaan dibantu dengan alat HT untuk mempermudah komunikasi antar pengelola saat kegiatan berjalan. Namun masih terdapat tantangan dari adanya koordinasi dan komunikasi antara pengelola dan pemerintah karena belum intensif dan belum rutin pelaksanaan koordinasi dan komunikasi.

Dalam kegiatan pelaksanaan akan dibutuhkan partisipasi dari sumber daya manusia sebagai pelaksana yang akan menjalankan rencana sesuai dengan pembagian tugas sebelumnya. Dalam pelaksanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan, partisipasi dari sumber daya manusia atau pelaksana yakni terdapat pada masyarakat dalam berbagai peran mulai dari pengelola sebagai partisipan yang paling aktif pada kegiatannya, sebagai pedagang yang memiliki lapak pada objek wisata, pelaku usaha yang di ajak untuk menjadi mitra dalam penyediaan kunjungan wisata, pemilik wisata yang akan dikunjungi objek wisatanya, dan masyarakat umum sebagai pengunjung yang juga ikut mempromosikan desa mereka.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan pengelolaan desa wisata dimana dengan keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu pelaksanaan kegiatan wisata ataupun pengelolaannya. Dalam kegiatan pelaksanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan, terdapat upaya pengembangan sumber daya manusia yang terwujud dalam keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wisata melalui berbagai pelatihan di bidang pariwisata yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan tambahan yang nanti juga akan disebarluaskan kepada pelaku wisata lainnya dalam praktek pengelolaan desa wisata.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pada pengelolaan desa wisata di Desa Kalongan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana wujud kegiatannya terdapat keterlibatan aktif dari masyarakat baik sebagai pengelola, pedagang, penyedia jasa transportasi, dan juga masyarakat umum sebagai pengunjung yang membantu kegiatan promosi. Dalam kegiatan pelaksanaan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan ditunjang dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup baik. Untuk menunjang profesionalisme dari pengelola, pada Desa Wisata Kalongan diberikan beberapa pelatihan di

bidang pariwisata yang bertujuan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia pelaku wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat (Terry, 2019) dimana kegiatan pelaksanaan menjadi sebuah langkah untuk mendorong anggota agar bekerja sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang akan menjadi acuan akan tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Dalam kegiatan pelaksanaan meliputi beberapa kegiatan didalamnya yakni penggerakkan dan pemberian motivasi kepada anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana, membangun komunikasi yang efektif, dan memberikan kepemimpinan. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai tahapan yang penting dalam menghubungkan perencanaan dan pengorganisasian melalui realisasi kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, didukung koordinasi dan komunikasi yang baik, serta keikutsertaan pengelola dalam pelatihan pariwisata sehingga dalam kegiatan ini tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kegiatan pengawasan pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan

Kegiatan pengawasan menjadi tahapan dalam kegiatan pengelolaan yang dilakukan untuk memastikan agar semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai pembagian tugas yang ditetapkan agar dapat mencapai tujuan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengawasan akan dapat diketahui beberapa kendala dan kemudian juga segera untuk ditemukan solusi pemecahannya sehingga kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan monitoring menjadi penting dalam pengelolaan desa wisata dimana kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan kegiatan desa wisata berjalan sesuai dengan rencana dan ketetapan yang ada sehingga jika terdapat kendala dapat segera diketahui dan kemudian akan ditindak lanjuti demi keberlanjutan kegiatan desa wisata. Pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, kegiatan monitoring dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelola yang dilaksanakan saat kegiatan berlangsung dan terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di atas pemerintah desa untuk memastikan keberlangsungan kegiatan dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Selain itu, masyarakat umum lainnya juga dapat memonitoring kegiatan lewat saran dan masukan yang disampaikan kepada pengelola yang kemudian akan ditindaklanjuti juga.

Setelah dilaksanakan kegiatan monitoring akan dilaksanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dimana kegiatan ini dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pengelolaan desa wisata agar tetap berjalan dengan baik dan hasil yang memuaskan bagi pengelola dan juga wisatawan tentunya, Pada Desa Wisata Kalongan, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut ini dilaksanakan secara partisipatif oleh pokdarwis dan pemerintah desa melalui forum yang bisa dilaksanakan daring melalui Whatsapp dan melalui luring melakukan

pertemuan untuk membahas hasil monitoring baik dari aspek fisik maupun non fisik yang kemudian hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi dan akan segera ditindaklanjuti oleh pengelola sehingga meminimalisir kendala-kendala saat kegiatan berlangsung kedepannya dan juga menjaga kualitas pengelolaan desa wisata agar terus berkembang lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada penyelenggaraan Desa Wisata Kalongan, kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pengelola untuk memantau jalannya kegiatan yang ada dalam menjaga pelaksanaan agar tetap kondusif dan meminimalisir adanya kendala yang dihadapi. Setelah ditemukan hasil identifikasi dari dilakukannya kegiatan monitoring selanjutnya pengelola dan pemerintah penyelenggara Desa Wisata Kalongan melakukan evaluasi yang dilaksanakan melalui forum baik daring maupun luring yang mencakup aspek fisik dan nonfisik. Dari hasil evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai dasar perbaikan untuk kedepannya ditindaklanjuti sehingga dapat meminimalisir kendala dan kekurangan serta dilakukan upaya perbaikan agar kualitas dari pengelolaan Desa Wisata Kalongan dapat meningkatkan kualitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Terry, 2019) kegiatan pengawasan dilakukan dengan pengukuran dan evaluasi hasil kerja yang dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, identifikasi masalah atau penyimpangan beserta pengambilan tindak lanjut korektif yang memastikan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Terdapat penelitian terkait kegiatan pengawasan desa wisata (Hae & Nugroho, 2021) kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan wisata yang ada berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Kalongan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya dibutuhkan sebagai proses penting untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan keberlanjutan desa wisata.

Implementasi konsep *community based-tourism* pada pengelolaan Desa Wisata Kalongan

Beberapa praktek pengelolaan desa wisata telah menerapkan konsep yang didalam kegiatan pengelolaan tersebut melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari kegiatan perencanaan hingga pengawasan. Konsep ini dikenal dengan pariwisata berbasis masyarakat (*community based-tourism*) dimana merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata yang ada. Penerapan konsep *community based-tourism* di Desa Wisata Kalongan telah diimplementasikan kedalam

kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan desa wisata di Desa Kalongan dimana masyarakat tidak sekedar menjadi objek wisata namun mereka juga aktif berpartisipasi baik sebagai pengelola, pemilik wisata, dan ikut serta pada pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Selain itu, dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan juga memberikan manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan sebagai pekerjaan sampingan bagi masyarakatnya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan wisata yang ada pada Desa Kalongan. Upaya pelestarian juga dilakukan baik itu pelestarian budaya dengan eksistensi kesenian asli Desa Kalongan yang masih terjaga yang sering ditampilkan dan terdapat kegiatan pelestarian lingkungan yang terwujud dalam pemeliharaan kebersihan pada objek dan kegiatan wisata yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan terwujud melalui peran mereka pada kegiatan pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang tergabung dalam pengelola desa wisata sebagai pelaku utama yang dibantu pemerintah desa. Selain itu, masyarakat umum selain pengelola banyak berpartisipasi secara tidak aktif melalui penyampaian saran dan masukan kepada pengelola serta menjadi pengunjung sekaligus mempromosikan kegiatan wisata yang ada. Desa Wisata Kalongan juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan diberikannya pelatihan-pelatihan terkait kegiatan pariwisata kepada pengelola dan pelaku wisata lainnya agar mereka bisa menambah keterampilan dan pengetahuan yang nantinya akan digunakan dalam praktek penyelenggaraan pengelolaan desa wisata saat berada dilapangan.

Dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Kalongan, telah diterapkan prinsip ini yang kemudian diidentifikasi oleh peneliti dimana penerapan konsep community based-tourism diimplementasikan kedalam 5 aspek yakni kepemilikan sumber daya dan kontrol lokal; manfaat ekonomi lokal; upaya pelestarian budaya dan lingkungan, partisipasi masyarakat; dan program pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Suansri, 2003) community based-tourism merupakan kegiatan pariwisata yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dimana kegiatan pariwisata dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang tujuannya dapat meningkatkan kesadaran dan mempelajari tentang cara hidup masyarakat setempat yang diperlihatkan kepada pengunjung. Pendapat lain menurut (Sutama et al., 2024) community based-tourism merupakan suatu konsep dimana kegiatan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat lokal dengan pelibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pembagian pendapatan sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi kemiskinan dan diharapkan juga terdapat upaya pelestarian lingkungan dan budaya setempat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyelenggaraan Desa Wisata Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dilaksanakan melalui beberapa fungsi pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang keseluruhannya diimplementasikan dengan pendekatan *community based-tourism*. Pada tahap perencanaan, kegiatan dimulai dari penetapan visi, misi, dan tujuan yang belum terdokumentasi secara tertulis, dilanjutkan dengan identifikasi potensi lokal serta perumusan program melalui musyawarah. Pendanaan dilakukan secara transparan dengan dukungan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah dan mitra desa, dan pelaksanaan mengacu pada kebijakan pemerintah daerah. Pada tahap pengorganisasian, struktur organisasi pengelola terdiri atas anggota Pokdarwis dan BUMDes, dengan pembagian tugas sesuai struktur namun tetap fleksibel dalam membantu tugas di luar tanggung jawab masing-masing. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara musyawarah partisipatif dengan melibatkan pengelola, masyarakat, dan pemerintah desa sebagai penasehat guna menghasilkan keputusan bersama.

Pelaksanaan pengelolaan desa wisata didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengelola melalui musyawarah, briefing, serta penggunaan alat komunikasi seperti handy talky (HT). Partisipasi masyarakat berlangsung secara aktif sebagai pengelola, pelaku wisata, dan pendukung kegiatan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penyebaran ilmu secara luas dalam komunitas. Pada aspek pengawasan, kegiatan dilakukan melalui monitoring oleh pemerintah desa dan pengelola, serta pengawasan dari pemerintah di tingkat atas terkait penggunaan dana. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara rutin oleh Pokdarwis dan pemerintah desa, baik melalui forum daring maupun luring, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Implementasi konsep *community based-tourism* di Desa Wisata Kalongan tercermin dari pelibatan aktif masyarakat sebagai pengelola, pemilik, dan pengambil keputusan, dengan partisipasi yang tidak hanya membuka peluang pendapatan sampingan tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Dukungan pemerintah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pariwisata turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menunjang pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, F., & Ilyas. (2024). *Pengelolaan Desa Wisata Berbasis CBT (Community Based Tourism) di Desa Wisata Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal*. 06(03), 17761–17775. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5666>
- Ananda, I., & Dirgahayu, T. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(4), 2991–2302. <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1095>
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Suluh Media.
- Hae, A. K. L., & Nugroho, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Koja Doi Di Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 105. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2021.v09.i01.p12>
- Juliana, Parani, R., Sitorus, N. I. B., Pramono, R., & Maleachi, S. (2021). Study of community based tourism in the district west Java. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(2), 277–285. <https://doi.org/10.18280/IJSDP.160207>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021). *Anugerah Desa Wisata Indonesia*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa-Wisata-Indonesia>
- Khasanah, U. R. (2022). *Manajemen Pengembangan Pariwisata (Kasus Tentang Penerapan CBT Di Desa Wisata Tinalah)*. Universitas Sebelas Maret.
- Kusumastuti, H., Pranita, D., Viendyasari, M., Rasul, M. S., & Sarjana, S. (2024). Leveraging Local Value in a Post-Smart Tourism Village to Encourage Sustainable Tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 16(2), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su16020873>
- Mahmud, A., Cahyati, W. H., Dyah, W., & Rengga, P. (2024). *Penguatan Branding Pasar Sawahan Desa Kalongan Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Ecotourism*. 5(3), 1018–1027. <https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.884>
- Nafisah, A., & Kisworo, B. (2022). Management of Eduwisata D ' las Serang. *Indonesian Journal of Society Innovation Studies*, 1(1), 16–24.
- Oka, I. M. D., Murni, N. G. N. S., & Mecha, I. P. S. (2021). The community-based tourism at the tourist village in the local people's perspective. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 977–996. <https://doi.org/10.30892/gtg.38401-735>
- PPID Kabupaten Semarang. (2024). *Pariwisata Kabupaten Semarang Berdayakan Ekonomi Warga*. https://webppid.semarangkab.go.id/berita_detail/81/pariwisata_kabupaten_semarang_berdayakan_ekonomi_warga
- Purwoko, Y., & Wijayanti, A. (2022). Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan, study kasus desa wisata Karang, Trimulyo, Sleman. *Journal Of Tourism And Economic*, 5(2), 130–146. <https://doi.org/10.36594/jtec/qmv6rk38>

- Setyowati, A. D., Yusuf, A., Malik, A., & Wang, J. (2023). Community Empowerment Through Making Iboni Craft to Improve Community Welfare and The Economic Impact. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(1), 72–82. <https://doi.org/10.21831/jppm.v10i1.59436>
- Shan, A. S. S., & Septemuryantoro, S. A. (2023). Management Of Tourism Village Governance In The New Normal Era. *International Conference on Digital Advance Tourism, Management and Technology*, 1(2), 145–151. <https://doi.org/10.56910/ictmt.v1i2.31>
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tour-REST.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160–173. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i2.1555>
- Suminar, T., Arbarini, M., Shofwan, I., & Loretha, A. (2021). Management of entrepreneurship training program in literacy village. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3523–3530. <https://doi.org/10.46254/an11.20210630>
- Sutama, I. K. G., Dewi, N. D. U., & Rahayu, L. R. (2024). Community Based Tourism sebagai Salah Satu Konsep Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Studi Perhotelan Dan Pariwisata*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.35912/jspp.v2i1.2042>
- Sutiani, N. W. (2021). Peran Serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. *Jurnal Cakrawarti*, 04(02), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v4i2.304>
- Terry, G. R. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara.
- Umam, K., Kurniawati, E., & Widiyanto, A. A. (2022). the Dynamics of “Pokdarwis Capung Alas” in the Development of Community - Based Tourism in Pujon Kidul Village During the Covid-19 Pandemic. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 43(3), 850–857. <https://doi.org/10.30892/gtg.43302-896>
- Umar, L. F., Sjamsuddin, S., & Rochmah, S. (2023). Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Community Based-Tourism di Desa Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), 54–62.
- Wibowo, A. M., Fakhruddin, Rifai, A., & Prihatin, T. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. In P. S. U. N. Semarang (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (pp. 910–916).